



## KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

### RINGKASAN KASUS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Akta Registrasi Sengketa : **0025/REG-PSI/XII/2017**  
Pemohon : **Lenny Anggraeni**  
Termohon : **Pemerintah Kota Samarinda**

1. Surat permohonan informasi dari Pemohon **Nomor: 17.2/X/SMD-2017, tanggal 17 Oktober 2017** ditujukan kepada **Bapak Walikota Samarinda**.
2. Informasi yang diminta/dimohon data secara lengkap dan falid tentang:
  - 2.1. **MOHON PENJELASAN dan tanggapan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 490/2396/BAK Jakarta, tanggal 4 April 2017 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda perihal tindak lanjut laporan Saudara Justina Lucky, SH atas nama perbuatan Lurah Sempaja Selatan dan Camat Samarinda Utara Kota Samarinda yang sampai saat ini kami belum mendapatkan kejelasan status hukum, dimana kuasa kami sampai saat ini belum mendapatkan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dimana Camat dan Lurah di bawah koordinasi Walikota Samarinda selaku Kepala Daerah Kotamadya Samarinda, dari perihal laporan hasil pelaksanaan kepada Menteri Dalam Negeri Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan.**
  - 2.2. **MOHON PENJELASAN pertanggungjawaban Camat Samarinda Utara membuat Hak Pelepasan atas nama Zainal Abidin kepada Mudjiati pada tanggal 15 Juli 2014 dengan No. Reg. 590/2212/VII/KASU/2014 dan surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Mudjiati kepada Mudjiati dengan No. Reg. 590/2284/VIII/KASU/2015.**
  - 2.3. **MOHON PENJELASAN Walikota Samarinda tentang system kerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan membuat surat pelepasan hak tanah serta syarat-syarat dibatalkan.**
3. Alasan permintaan dan tujuan penggunaan informasi:  
--- ---
4. Surat keberatan dari Pemohon **Nomor: 08.2/XI/SMD-2017, tanggal 8 Nopember 2017** ditujukan kepada **Bapak Walikota Samarinda**.
5. Surat dari Badan Publik:  
--- ---
6. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dari Pemohon surat **Nomor: 22/XII/SMD/2017, tanggal 22 Desember 2017** diterima Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, **22 Desember 2017**